

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen serta hambatan apa yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia, jika terjadi sengketa bagaimana penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pembuatan akta fidusia hal-hal yang harus dilakukan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan akta itu bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Para pihak datang langsung berhadapan dengan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembuatan Akta Notaris, harus dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta menolak untuk membuat akta, jika surat kuasa yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan kuasa tersebut menjadi bagian dalam isi yang tidak terpisahkan dari perjanjian baku yang disiapkan oleh penerima fidusia, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Kata Kunci : Notaris, Konsumen, Fidusia.

ABSTRACT

This study discusses the role of notaries in making fiduciary deeds for consumer protection based on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999. The purpose of this study is to determine how the role of notaries in making fiduciary deeds for consumer protection and what obstacles occur in the process of making fiduciary deeds. , in the event of a dispute, how can it be resolved based on Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999.

The approach method used is the normative juridical method. The research specification used in this research is descriptive analytical. The sources and types of data in this study are secondary data. These problems are studied with the theory of legal certainty and legal protection.

Based on the results of the research, the role of the notary in providing services to the public, especially for making fiduciary deeds, is things that must be done so that no parties are harmed and the deed can provide protection and legal certainty. The parties come face to face with the Notary. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, making a Notary Deed, must be before a Notary according to the form and procedure stipulated by the Law, and refuse to make a deed, if power of attorney that is contrary to Article 18 paragraph (1) letter h. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which states that the power of attorney is an integral part of the standard agreement prepared by the fiduciary recipient, and Law No. 8 of 1999 divides consumer dispute resolution into 2 (two) parts, namely: Settlement of disputes outside of court and Settlement of consumer disputes through courts (litigation).

Keywords: Notary, Consumer, Fiduciary.